

ASISTEN DEPUTI

Pemberdayaan Partisipasi
Masyarakat

Implementasi Kebijakan SKM dalam Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik di Provinsi Nusa Tenggara Barat



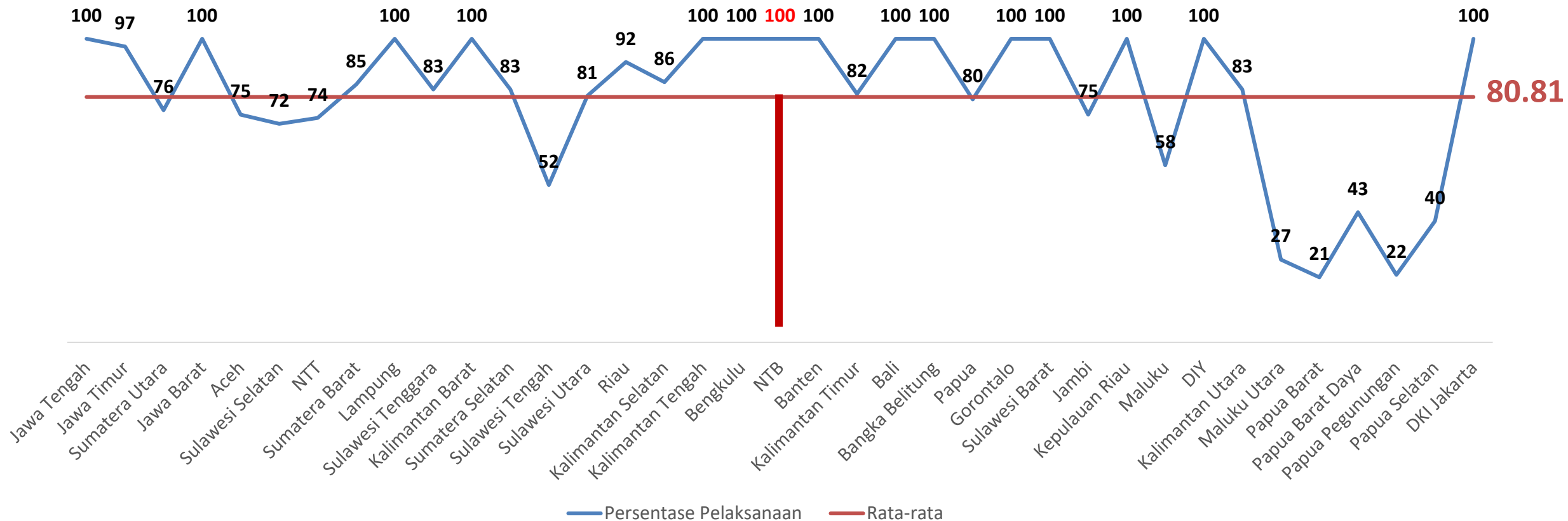
Data Jumlah Instansi yang Melaksanakan SKM (Nasional)



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**Deputi
YANLIK**

* Dalam Persen



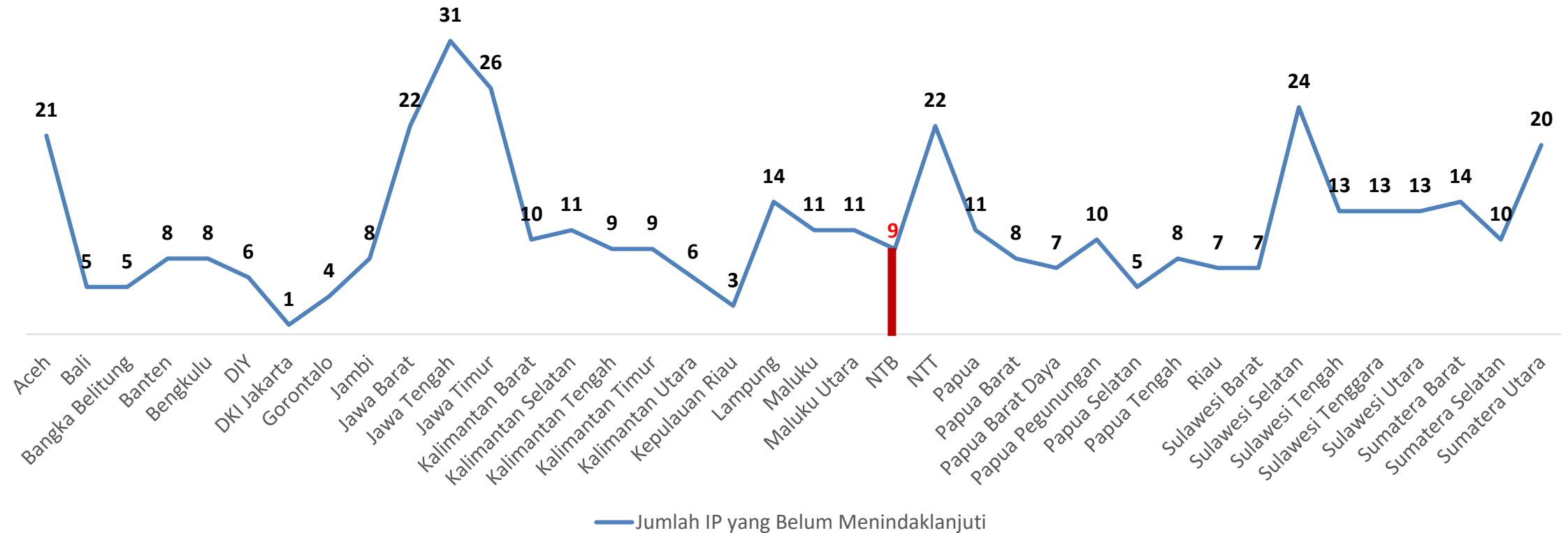
Data Jumlah Kabupaten, Kota, dan Provinsi yang Belum Menindaklanjuti SKM



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**Deputi
YANLIK**

Jumlah IP yang Belum Menindaklanjuti (per-Provinsi)



Pendahuluan



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**Deputi
YANLIK**

3 Agustus 2023



01

**Surat Deputi No.
B/971/PP.99/2023**

Perihal Permohonan Data
SKM dalam Rangka
Pembentukan Indeks
Reformasi Birokrasi.

19 September 2023



02

**Surat Deputi No.
B/189/PP.06/2023**

Perpanjangan Periode
Pelaporan Pelaksanaan
Survei Kepuasan
Masyarakat dalam Rangka
Pembentukan Indeks
Reformasi Birokrasi

13 Oktober 2023



03

**Surat Deputi No.
B/160/PP.00.01/2023**

Hasil Screening Laporan
Survei Kepuasan Masyarakat
(SKM) dan Pemberitahuan
Perpanjangan Periode
Pelaporan SKM Untuk
Pembentukan Indeks
Reformasi Birokrasi

27 Desember 2023



04

**Surat Deputi No.
B/226/PP.00.01/2023**

Kewajiban Penyampaian
Laporan SKM Tahun 2023

Indikator Reviu Laporan Pelaksanaan SKM



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**Deputi
YANLIK**

- | | | | |
|----------|--|---|---|
| 1 | Keterlaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat | → | Keterlaksanaan dilihat dari apakah instansi pemerintah telah menyampaikan laporan atau belum |
| 2 | Jumlah UPP yang Melaksanakan | → | Jumlah UPP dilihat dari bukti laporan organisasi serta laporan UPP yang tertera pada lampiran laporan organisasi |
| 3 | Kesesuaian Kuesioner | → | Kuesioner yang digunakan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri PANRB No. 14 Tahun 2017. |
| 4 | Laporan pelaksanaan SKM Telah Dikompilasi | → | Laporan pelaksanaan SKM dikompilasi oleh Biro/Bagian Organisasi untuk dibentuk IKM Instansi dan disusun rencana aksi. |
| 5 | Tindaklanjut hasil SKM periode sebelumnya | → | UPP telah melampirkan bukti dukung tindaklanjut hasil survei pada periode sebelumnya. |
| 6 | Bukti pelaksanaan SKM UPP | → | Laporan yang disusun oleh Biro/Bagian Organisasi melampirkan bukti/laporan pelaksanaan SKM di UPP. |
| 7 | Ketepatan penyampaian laporan SKM | → | Laporan yang disampaikan oleh Biro/Bagian Organisasi tidak melebihi tanggal 31 Desember 2023. |

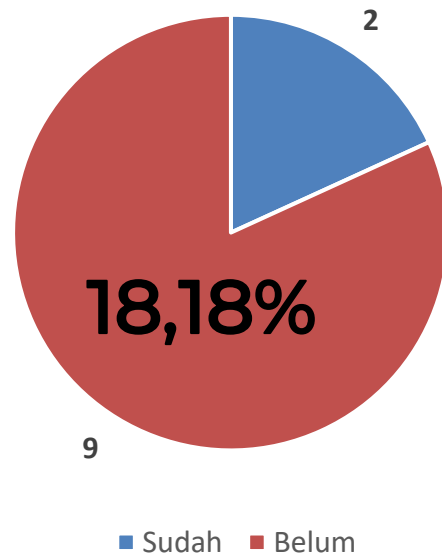
Hasil Reviu Laporan Pelaksanaan SKM Lingkup NTB



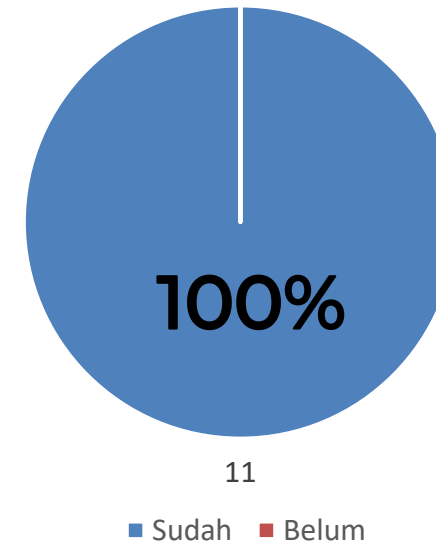
panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

**Deputi
YANLIK**

Tindak Lanjut SKM



Jumlah Instansi yang Telah Melaksanakan SKM



Instansi yang Sudah Menindaklanjuti SKM:

1. Provinsi NTB
2. Kabupaten Dompu

Ketentuan Penyampaian **Laporan SKM Tahun 2024**

Berdasarkan SE Menteri PANRB No. 12 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan SKM di Lingkup Instansi Pemerintah

Waktu

15 Desember 2024

Format Laporan

bit.ly/templatelaporanskm

Link

bit.ly/pelaporanskmfkp

! Pada Tahun 2024 setiap Instansi **WAJIB** menyampaikan laporan tindak lanjut hasil SKM periode sebelumnya yang dilakukan oleh UPP

Hasil SKM yang dilaporkan sesuai dengan ketentuan akan digunakan untuk proses PEKPPP dan Pembentukan Indeks Reformasi Birokrasi

Rencana Tahun 2025: SKM dijadikan F03 PEKPPP

Pembentukan Indeks RB sejak tahun 2022 SKM mendapatkan bobot 8%



panrb
KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

Deputi
YANLIK

Terima Kasih

Berikut adalah nomor Help Desk Asdep PPM serta tautan materi SKM dan FKP:



bit.ly/partisipasiyanlik



0811-1928-2666



asdep.ppm@menpan.go.id

